



1

Oleh : AG. Eka Wenats Wuryanta

Literasi Informasi, Masyarakat dan Media Baru:

# Wacana Masyarakat Informasi dan Dinamika Teknologi Media

## Pra Wacana

Sekarang ini sedang terjadi revolusi yang luar biasa menarik, mencengangkan dan sekaligus menantang bagi manusia. Revolusi ini menarik karena revolusi ini membawa perubahan pola dan struktur proses komunikasi manusia. Revolusi ini juga mencengangkan karena dari revolusi itu tumbuh dan berkembang teknologi informasi manusia yang pada akhirnya mampu untuk melampaui batasan ruang dan waktu. Revolusi ini juga menantang karena revolusi ini juga membawa pengaruh “tidak sehat” terhadap manusia yang gagap dan rakus “gejolak” terhadap pola-pola kemudahan teknis yang ditawarkan. Ketika informasi menjadi salah satu unsur konstitutif dalam suatu masyarakat, maka masyarakat “mau tidak mau” membuka diri pada media massa dan komunikasi global. Perputaran produksi, konsumsi dan distribusi informasi semakin cepat dialami dan dimiliki oleh sistem masyarakat baru yang global dengan didukung oleh kekuatan dan ekspansi ekonomi, jaringan sistem informasi global serta terakhir disokong oleh teknologi.

Dengan mengukur perkembangan komunikasi dari pengaruh pra-lisan, tradisi lisan, tulisan, cetakan, media massa dan akhirnya telematika dapat disimak bahwa bagaimana lambannya gerakan proses kebudayaan komunikasi tersebut pada proses awalnya, tapi kemudian terakselerasi secara cepat dan massif pada era belakangan ini (Asa Briggs, 2002).

Teknologi dalam perkembangan arus produksi, konsumsi

dan distribusi informasi memegang peranan penting. Urgensi peranan teknologi dalam proses massifikasi informasi terletak ketika hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas.

Berkaitan dengan pernyataan yang telah dikemukakan dan tidak jauh dari waktu pembuatan tulisan ini, kita sebagai masyarakat terpa fenomena di era informasi dan keterbukaan, yaitu ketika kasus "cicak versus buaya" (pertikaian antara KPK dan Kepolisian-Kejaksaan) menjadi *top headline* dari berbagai media massa. Melalui pemberitaan di media massa, khususnya di televisi, warga memperoleh aneka informasi dalam jumlah yang sedemikian besar. Bukan saja jumlahnya yang besar, tetapi jenis, sumber, dan kualitas informasi juga sangat beragam. Selain dibombardir oleh fakta gamblang hasil penyelidikan pihak berwajib, masyarakat juga dihujani aneka pendapat dari komentator, analis, pejabat, dan bahkan dari orang-orang yang langsung terlibat skandal korupsi. Setelah kasus itu mereda, muncul upaya parlemen menyelidiki kasus Bank Century, seolah-olah melanjutkan silang sengkabut informasi yang diterima oleh masyarakat. Kali ini media massa memaparkan secara rinci bagaimana para anggota Dewan Perwakilan Rakyat berusaha merespon harapan rakyat tentang fungsi mereka sebagai wakil yang harus membongkar penyelewengan. Publik kembali dibombardir oleh berita tentang perdebatan di parlemen, serta curahan pendapat dari komentator, analis, pejabat, dan para petinggi

partai.

Di tengah suasana hiruk-pikuk yang mencerminkan keterbukaan dan keleluasaan publik, muncul fenomena yang berlawanan. Dua film yang akan beredar di masyarakat mengalami upaya sensor. Film deskriptif tentang kiamat, 2012 sempat ditentang oleh beberapa kalangan dan bahkan dilarang beredar di beberapa kota. Sementara film fiksi *Balibo Five* yang diinspirasi peristiwa terbunuhnya para wartawan Australia dalam konflik Timor-Portugal sebelum dianeksasi oleh Indonesia untuk dilarang ikut Jakarta Film Festival. Upaya-upaya pelarangan ini memiliki persamaan motivasi: mencegah publik mendapatkan hal-hal yang "tidak benar" atau "mengganggu ketentraman masyarakat". Belum lagi belakangan terdapat usaha untuk "meluruskan" fakta yang sebenarnya dari sebuah pemaparan audio visual dalam film "*Cowboys in Paradise*" yang menceritakan fakta lain yang menyatakan bahwa Bali juga dikenal dengan wisata seksual, melalui aktivitas para gigolo. Ini memperlihatkan adanya urgensi literasi informasi berikut implementasi dan konsekuensi logis yang menyertainya.

Dalam beberapa kondisi tersebut maka artikel ini dibuat untuk tujuan beberapa hal penting, yaitu: pemahaman menyeluruh tentang informasi, masyarakat informasi dan literasi informasi, pemahaman tentang dinamika perkembangan media baru dalam konteks perkembangan literasi informasi, terakhir; wacana industri media baru dengan literasi informasi-literasi media.

## INFORMASI:

### Karakteristik dan Hambatan yang Muncul

*Pengetahuan adalah kekuasaan (knowledge is power), penguasaan pengetahuan berarti juga penguasaan atas dunia.*

Demikianlah urgensi pengetahuan, dalam hal ini termasuk informasi, menjadi kekuatan yang luar biasa karena informasi adalah salah satu sumber yang penting dan berharga. Informasi adalah suatu nilai untuk mengetahui suatu hal

yang belum jelas (Littlejohn, 2008: 69-75). Saat ini informasi dalam arti kesanggupan mengirim, menyimpan dan menggunakan informasi sudah dianggap sebagai unsur yang sama nilainya dengan energi atau bahan baku.

Tanpa menguasai informasi maka orang akan pasif, tetapi dengan menguasai informasi seseorang akan mendapat suatu rangsangan sehingga akan menimbulkan kreativitas untuk melakukan sesuatu. Apalagi di era informatika komunikasi yang sangat kompetitif ini, informasi menjadi sangat penting agar seseorang,

masyarakat, suatu institusi dan negara dapat mempunyai daya saing yang tinggi.

Ada hubungan antara informasi dan kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan adanya suatu kemampuan daya saing yang ditunjang oleh informasi, ilmu, *knowledge*, *wisdom*, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan pasar (Raharjo, www.cert.com). Aksesibilitas berarti adanya mekanisme akses terhadap informasi dan ketersediaan informasi. Akses terhadap informasi membutuhkan ketersediaan infrastruktur (telekomunikasi, listrik) dan perangkat (*hardware* dan *software*) serta penguasaan penggunaan komputer (literasi komputer).

Dengan demikian tujuan akhir penggunaan media informasi dan komunikasi adalah kesejahteraan dari rakyat yang tercermin dalam kemampuan ekonomi dari negara tersebut. Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupannya agar lebih meningkat. Dengan membanjirnya informasi bagi masyarakat memungkinkan bertambahnya orang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh kelompok profesional sehingga dapat dimasyarakatkan. Selain itu dengan kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi menyebabkan jarak antar kelompok masyarakat dapat diadukan.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dapat diketengahkan oleh bermacam-macam media komunikasi. Dengan banyaknya sumber informasi tersebut akan dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Bagi institusi, informasi sangat membantu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta dalam proses pengambilan keputusan. Karena banyaknya peran informasi di dalam masyarakat modern, maka diperlukan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi khusus yaitu yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya informasi dan tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memberi prospek yang cerah bagi kemajuan industri.

Informasi bagi suatu negara dapat sebagai sumber kekuasaan. Selain itu informasi bagi suatu negara dapat memberi sumbangan kepada kekuatan dan kestabilan sistem sosial, politik, ekonomi dan kebudayaannya. Informasi dalam suatu negara dapat sebagai kekuatan di bidang ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam melaksanakan pembangunan.

## MASYARAKAT INFORMASI DAN LITERASI INFORMASI: Telaah Prinsip dan Konsekuensi

*Beberapa pernyataan dinyatakan oleh para pemerhati perkembangan komunikasi modern yang memperlihatkan kepada manusia bahwa informasi menjadi unsur penting dalam suatu masyarakat.*

Straubhaar menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi politik-sosial melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi. Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi (Straubhaar, 2002).

Masyarakat Informasi, dalam McQuail (1992), adalah masyarakat yang bergantung pada jaringan informasi dan komunikasi elektronik, serta

*Peserta Pelatihan Internet sebagai sumber belajar di PSBG Saiyo Sakato 17*



mengalokasikan sebagian besar sumber daya bagi aktivitas-aktivitas informasi dan komunikasi. Masyarakat Informasi adalah masyarakat berbasis data digital. Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan sebagai *information is the lifeblood that sustains political, social and business decision*. Hal ini pula yang mengakibatkan bahwa masyarakat membuka diri dengan perkembangan dan dinamika media baru dan komunikasi global. Teknologi dalam perkembangan arus produksi, konsumsi dan distribusi informasi memegang peranan penting. Urgensi peranan teknologi dalam proses massifikasi informasi terjadi ketika hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pola komunikasi informasi nir batas.

Harapan yang dijadikan patokan sebuah masyarakat terhadap prinsip masyarakat informasi adalah pembebasan manusia dari penderitaan, lewat peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi yang dicapai berkat pemanfaatan teknologi informasi. Proses pertukaran informasi dan komunikasi secara lebih bebas diyakini sebagai alat efektif untuk melakukan kemajuan. Tak heran jika seluruh dunia berupaya mengejar ketertinggalan teknologi lewat proyek-proyek digitalisasi. Media massa berkonvergensi, membuka pelbagai saluran informasi, dan menerpa khalayak dengan (sensasi) informasi yang begitu banyak dan melimpah.

Permasalahannya adalah bahwa keberlimpahan informasi belum tentu mencerdaskan khalayak. Konvergensi media memang membuka pasar industri yang ramai. Tapi keuntungannya lebih banyak dinikmati oleh para pelaku pasar. Maraknya media massa tidak dibarengi dengan isi yang membangun. Kunci-kunci akses teknologi tetap dipegang oleh penguasa-penguasa teknologi, yang berkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar.

Banjir informasi adalah keseharian khalayak, perdebatan berlarut seputar hak penguasaan frekuensi, perebutan ranah publik, komodifikasi khalayak, sentralisasi dan sensor, keamanan informasi, serta penciptaan pasar yang dikendalikan oleh instrumen-instrumen seperti rating. Dalam kondisi ini, khalayak sering ditinggalkan, dibiarkan untuk diseret dan ditenggelamkan dalam banjir informasi hingga mencapai titik kejenuhan informasi—*information overloaded*. Khalayak dengan demikian hanya diposisikan dan dilihat sebagai khalayak pasif. Khalayak tak lebih dari konsumen, yang habis-habisan dieksploitasi oleh pasar media mau pun

bisnis informasi.

Dalam konteks masyarakat digital maka masyarakat informasi adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan perkembangan media massa kontemporer yang diwarnai dengan digitalisasi dan teknologisasi media.

Tentunya masyarakat informasi berkaitan dengan beberapa syarat literasi, termasuk di dalamnya literasi informasi. Literasi informasi sering disebut juga dengan keberaksaraan informasi atau kemelekakan informasi. Dalam bidang ilmu informasi, literasi informasi sering dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar informasi yang tersedia. Pengertian literasi informasi yang sering dikutip adalah pengertian literasi informasi dari *American Library Association (ALA)* : *"information literacy is a set of abilities requiring individuals to "recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effective needed information"*. Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. (dalam Naibaho, 2007: 7-8).

Masyarakat Informasi tidak akan mungkin terjadi jika tidak disertai dengan pembekalan *information literacy* (literasi informasi) kepada khalayak. Informasi yang melimpah sesungguhnya bisa menjadi sumberdaya yang bermanfaat, jika khalayak cukup memadai dalam literasi informasi. Literasi informasi, adalah kemampuan untuk mengakses sumber-sumber informasi, bisa menyeleksi informasi sesuai kebutuhannya, bisa menganalisis informasi secara kritis, dan bisa mengelola informasi. Tanpa bekal literasi informasi, publik hanya menjadi komoditas pasar dari pemilik modal teknologi informasi.

Terdapat dua aspek dari literasi informasi, yaitu: literasi teknologi informasi dan literasi media. Mengapa literasi TI begitu penting? Tidak ada gunanya melakukan akselerasi teknologi media atau menyelenggarakan proyek digitalisasi yang mahal, ketika khalayak tidak tahu mau dibawa ke mana dengan teknologi tersebut. Mengapa literasi media menjadi penting? Tidak ada gunanya membuka saluran media massa, dan pemahaman atas terpaan khalayak dengan media,

ketika ujung-ujungnya publik hanya disugahi program atau isi informasi yang tidak mencerdaskan. Itulah sebabnya, apabila kita perlu memahami dinamika relasi antara teknologi, industri media dan masyarakat informasi.

## TEKNOLOGI, INDUSTRIALISASI MEDIA DAN MASYARAKAT INFORMASI

*Teknologi dalam industrialisasi media sangat penting. Setidaknya industrialisasi media komunikasi membutuhkan teknologi untuk menjadi perpanjangan tangan yang efektif menaikkan skala keuntungan ekonomi yang diperoleh.*

Beberapa argumentasi yang perlu dikaji, selain argumentasi ekonomi. Pertama adalah argumentasi kultur komunikasi yang berkembang. Argumentasi ini mau memperlihatkan adanya perkembangan atau perubahan mobilitas manusia dan keterbatasan ruang dan waktu bisa mempengaruhi pola komunikasi manusia.

Kedua adalah argumentasi perkembangan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang dihidupi oleh manusia modern. Setidaknya perlu dikaji soal relasi signifikan antara perkembangan sistem ekonomi, sosial dan budaya dengan soal urgensi pemanfaatan teknologi dalam industrialisasi media (Turow, 1997).

Ketiga, adalah argumentasi subjektif manusia yang selalu tidak merasa puas dengan perkembangan media komunikasi modern. Alat komunikasi perlu disesuaikan dengan pola pikir dan pola tindakan manusia setempat.

Beberapa keyakinan yang menyertai teknologi sebagai sebuah sistem dan praksis. Teknologi sebagai suatu sistem nilai dan praksis kerja yang mengikutinya berada dalam konstelasi proses progres. Dinamisasi efisiensi dan tujuan tertentu mau tidak mau mengandalkan progres (kemajuan linear) dalam teknologi. Efisiensi industri dan teknologi mengakibatkan mekanisasi, otomatisasi, massifikasi produksi dan konsumsi, ekspansi distribusi dan stabilisasi sumber alam yang dipakai untuk perkembangan teknologi itu sendiri.

Industrialisasi produksi isi dan ragam media komunikasi berproses untuk semakin: konvergen dalam hal teknologi media yang ada, digital, mengoptimalkan teknologi serat optik dan teknologi jaringan pada simpul-simpul teknologi komunikasi modern (Dahlan, 2000). Industrialisasi distribusi isi dan ragam media juga akan banyak dipengaruhi oleh soal perubahan yang terjadi pada perangkat dan sarana media komunikasi itu sendiri. Tingkat mobilitas yang tinggi dalam distribusi media modern sudah menjadi tuntutan yang wajar dalam masyarakat informasi. Tingkat mobilitas dan arus lalu lintas informasi telah menjadi pola perubahan sistem distribusi dalam media massa. Selain itu, media komunikasi modern juga memusatkan pola duplikasi, sistem satelit, digitalisasi informasi jarak jauh, tele-text dalam seluruh proses distribusi media komunikasi modern.

Argumentasi hubungan teknologi dengan media informasi adalah logika perkembangan yang ekspansif proses komunikasi publik secara global. Masyarakat tidak bisa lagi mengelakkan diri dari proses komunikasi. Komunikasi sudah menjadi kebutuhan utama. Komunikasi membutuhkan media untuk menjadi penghantar (menyangkut teknologi informasi yang mempermudah manusia mengirim dan menerima pesan). Ketika ruang dan waktu menjadi faktor yang membatasi proses komunikasi maka diperlukan teknologi yang mengusahakan masalah tersebut. Teknologi komunikasi dibuat dan dikembangkan untuk menyokong proses komunikasi manusia. Perkembangan komunikasi sangat luar biasa. Perkembangan dramatik teknologi komunikasi tidak terletak pada soal sistem perangkat kerasnya saja tapi sudah menyangkut soal bagaimana membuat interkoneksi jaringan komunikasi. Teknologi komunikasi bukan sekedar soal barang tapi juga soal teknologi jaringan itu sendiri.

Kalau kita mau membicarakan struktur industrialisasi media maka kita tidak memisahkan



diri dari isi media yang dibuat dan diciptakan. Teknologi komunikasi merupakan perangkat yang membutuhkan biaya yang tinggi, dengan demikian hanya pemilik modal besar saja yang mampu menguasai teknologi. Maka tidak mengherankan apabila industrialisasi dan teknologisasi media komunikasi membawa industri media pada usaha konglomerasi.

Sejumlah langkah kini harus dilakukan untuk

memberdayakan khalayak agar melek informasi. Pertama, strategi *decentring* atau pemecahan konsentrasi kekuasaan pada simpul-simpul yang lebih kecil. Dalam konteks Masyarakat Informasi, *decentring* harus diterjemahkan sebagai pemecahan konsentrasi penguasaan teknologi informasi, yang saat ini hanya terpusat pada lokus-lokus tertentu.

Peran pemerintah dalam hal ini diperlukan

ilus: [www.trunabali.wordpress.com](http://www.trunabali.wordpress.com)



Akses internet gratis menggunakan MCAP (Mobile Community Access Point.) di Denpasar

sebagai regulator atau fasilitator yang bijak dan berpihak pada publik, tidak semata-mata menyerahkan pada kepentingan ideologis atau kepentingan pasar. Peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga diperlukan, sebagai jembatan penghubung antara pusat-pusat kekuasaan dengan publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa duduk bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers dan lainnya, untuk membicarakan dan mendiskusikan langkah-langkah bagaimana menjadikan informasi dan muatan komunikasi sebagai ranah publik.

Sesungguhnya, ini merupakan upaya dan proses *decentering* untuk memecah konsentrasi penguasaan ranah penyiaran dan informasi, yang tadinya hanya berada di tangan pemerintah. Proyek Koran Masuk Desa, pengadaan Internet bagi wilayah perdesaan, atau pendirian pusat-pusat informasi masyarakat di tingkat RW juga bisa dibaca sebagai strategi *decentering*. Tujuannya tidak lain menjadikan teknologi informasi dan pertukaran informasi tak cuma terfokus di kota-kota besar, sehingga bisa dinikmati hingga ke sentra-sentra masyarakat terkecil. *Decentering* tidak sekadar membuka akses, tapi juga membuka ruang-ruang partisipatori. Informasi yang lazimnya bersifat *top down* (dari pusat ke pinggiran) kini bisa diseimbangkan dengan alur *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Tapi, *decentering* saja tidak cukup. Strategi kedua yang harus dilakukan adalah memberdayakan publik lewat pendidikan melek media dan melek informasi. Menempatkan komputer di desa-desa, mengembangkan jaringan internet sampai tingkat RW, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan mengenai cara memanfaatkannya, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab. Berapa banyak komputer dan perangkat instalasi Internet yang terenggok tanpa guna di rumah-rumah pemuka desa, atau ketua-ketua RW, hanya karena masyarakat tidak tahu cara menggunakannya. Perlu dilakukan pendataan menyangkut komunitas mana yang memang memerlukannya. Bila komunitas belum membutuhkan teknologi komputer dan Internet, serta tidak punya daya dukung, semisal listrik yang memadai, tentu tidak perlu dipaksakan. Mereka bisa diberdayakan melalui perangkat informasi lain. Itu pun kalau informasi memang diyakini sebagai kunci kemajuan masyarakat. Mengembangkan radio komunitas,

mendirikan perpustakaan gratis, atau memberdayakan majelis taklim sebagai pusat pertukaran informasi masyarakat, bisa menjadi upaya alternatif untuk membuat masyarakat melek informasi dan melek media.

Dalam konteks *media literacy* dan *information literacy*, hal-ihwal apa yang mesti ditransfer pada publik? Pertama-tama adalah pengenalan mengenai jenis-jenis informasi dan media informasi. Selanjutnya, mendampingi publik agar bisa memproduksi sendiri informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, publik tidak sekadar mampu menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhannya, tetapi juga bisa memelihara *content* dan mengelola medianya sendiri. Inilah sesungguhnya esensi demokratisasi informasi—publik yang berdaya menjadi produsen, sekaligus konsumen informasi!

Strategi ketiga adalah mengembangkan jejaring advokasi media dan informasi. Jejaring ini penting untuk menguatkan publik, menjamin akses agar senantiasa terbuka ke segala pihak, termasuk melakukan kontrol bersama untuk menjaga agar wahana informasi dan komunikasi tidak lagi dikuasai secara sepihak—oleh siapapun. *Stakeholder* yang bisa dilibatkan meliputi kalangan pendidik dan akademisi, praktisi atau profesional-profesional media, teknokrat dan industrialis, publik pada umumnya, biro-biro pemerintah, lembaga legislatif, organisasi non pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ringkasnya, siapapun yang memiliki *concern* pada isu pemberdayaan publik, *media literacy*, *information literacy*, dan *IT literacy*.

Dari aspek teknologi, semua ini dimungkinkan berkat berkembangnya teknologi *open source*, *personal-based-technology*, dan *user-friendly-gadget*. Tapi, yang tak kalah penting, hendaknya seluruh strategi pemberdayaan publik dilakukan seiring sejalan. Bukan jamannya lagi menjalankan kebijakan parsial, atau setengah-setengah, karena hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu (dan biasanya bukan publik!). Pada dasarnya, yang mesti dilakukan adalah pekerjaan yang sangat besar, yaitu menegakkan atau merekonstruksi kedaulatan publik di ranah informasi.